

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A.Landasan Teoritis**

##### **2.1 Pengertian Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, sehingga secara mendasar dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, Dahl (2021) menegaskan bahwa demokrasi merupakan tatanan politik yang memberikan ruang bagi keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan kebijakan publik sekaligus memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan setiap individu.

Untuk memahami eksistensi demokrasi saat ini, diperlukan pemahaman mengenai perkembangan historis sistem ini. Demokrasi pertama kali lahir pada abad ke-5 SM di negara-kota (polis) Athena, Yunani Kuno. Pada masa itu, diterapkan model demokrasi langsung di mana warga negara pria yang merdeka berkumpul di alun-alun kota (agora) untuk menetapkan undang-undang dan kebijakan perang. Namun, runtuhnya peradaban Yunani Kuno membuat sistem ini tenggelam selama berabad-abad, digantikan oleh sistem feodalisme dan monarki absolut di Eropa. Demokrasi kembali bangkit pada era Renaissance dan Enlightenment (Abad Pencerahan) di Eropa, yang dipicu oleh lahirnya piagam Magna Carta (1215), Revolusi Prancis (1789), serta pemikiran para filsuf seperti John Locke tentang hak-hak kodrati manusia dan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (Trias Politica).

Demokrasi merupakan tatanan politik yang berpijak pada prinsip

kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, di mana masyarakat memegang peranan tertinggi dalam struktur pemerintahan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani demos (rakyat) dan cratein (kekuasaan), yang menegaskan bahwa otoritas negara sejatinya bersumber dari rakyat sendiri. Dalam perkembangannya, sebagaimana ditegaskan oleh Nashir (2021), demokrasi tidak lagi sekadar teori formal, melainkan telah bertransformasi menjadi doktrin politik dunia yang diyakini sebagai jalan utama menuju kesejahteraan sosial melalui partisipasi aktif publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis.

Struktur institusi demokrasi yang kokoh seperti keberadaan parlemen, pemilu, dan lembaga peradilan tidak akan berfungsi optimal tanpa didukung oleh budaya politik yang sejalan. Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam studi klasiknya membagi budaya politik menjadi tiga jenis: parokial, subjek, dan partisipan. Sistem demokrasi yang sehat membutuhkan dominasi budaya politik partisipan, yaitu kondisi di mana warga negara memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajibannya, bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku.

Selain budaya politik, elemen kunci yang menjamin keberlangsungan demokrasi adalah kekuatan masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil adalah ruang publik yang mandiri dan bebas dari intervensi langsung negara, yang diisi oleh organisasi non-pemerintah (LSM), asosiasi profesi, media massa independen, dan gerakan mahasiswa.

Dalam konteks akademik, pemahaman mengenai model dan bentuk demokrasi sangat krusial untuk menganalisis bagaimana sebuah negara mengelola konflik kepentingan dan mendistribusikan kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan

dalam literatur kontemporer, variasi demokrasi tidak hanya terbatas pada cara rakyat menyalurkan aspirasinya baik secara langsung maupun melalui perwakilan tetapi juga pada apa yang menjadi prioritas utama dari sistem tersebut. Tantangan terbesar demokrasi modern adalah bagaimana menyelaraskan pemenuhan hak-hak politik formal dengan keadilan ekonomi material, agar demokrasi tidak sekadar menjadi prosedur pemilu lima tahunan, melainkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial yang nyata. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengkajian teoretis yang mendalam mengenai pengertian, prinsip, serta model-model demokrasi sebagai fondasi untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan yang berjalan.

Dalam istilah politik, beberapa ahli memberikan definisi demokrasi sebagai Berikut:

Joseph A. Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai sistem kelembagaan yang memungkinkan individu memperoleh kekuasaan melalui kompetisi dalam pemilihan umum.

Affan Gaffar membagi demokrasi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif merujuk pada konsep ideal yang seharusnya diterapkan oleh suatu negara, sedangkan demokrasi empirik Mengacu pada praktik demokrasi dalam kehidupan politik sehari-hari (Azyumardi Azra, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi memiliki beberapa makna, antara lain:

1. Sistem pemerintahan di mana rakyat turut serta dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil mereka.

2. Prinsip yang menekankan persamaan hak, kebebasan, serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara.

Dari berbagai pengertian tersebut, demokrasi dapat dikategorikan ke dalam dua makna utama:

1. Sebagai Bentuk Pemerintahan

Abraham Lincoln (2020) mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan Yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan Rakyat (government of the people, by the people, for the people).

2. Sebagai Nilai dan Pandangan Hidup

Tim Abdi Guru (2022) menekankan bahwa demokrasi tidak hanya diterapkan dalam sistem pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, Baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Secara historis, demokrasi telah mengalami perkembangan dari sistem demokrasi langsung di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan menuju demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Prinsip utama demokrasi mencakup kebebasan individu, kesetaraan, partisipasi politik, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat.

Konsepsi demokrasi kontemporer tidak lagi membatasi diri hanya sebagai sistem ketatanegaraan atau mekanisme prosedural pemilu semata. Dalam perspektif sosiopolitik, demokrasi telah bergeser menjadi sebuah budaya, etos kerja, serta pandangan hidup (way of life) masyarakat.

Sebagai sebuah pandangan hidup, demokrasi menuntut internalisasi nilai-nilai keadaban ke dalam perilaku sehari-hari warga negara maupun penyelenggara

negara. Nilai-nilai tersebut mencakup sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat, kesediaan untuk menyelesaikan konflik kepentingan melalui jalur musyawarah dan mufakat yang damai, pengakuan terhadap pluralisme (keberagaman), serta penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan kehendak secara sepihak (anti-otoritarianisme). Tanpa adanya kultur demokrasi yang kuat dalam masyarakat, struktur kelembagaan demokrasi yang megah sekalipun akan rentan mengalami kemunduran atau degradasi nilai.

klasifikasi demokrasi menurut analisis terbaru dari Ramadhan dkk. (2026) dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama yang diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem politik. Pertama, demokrasi formal merupakan sistem yang sangat memprioritaskan kesetaraan di ranah politik dan pemenuhan prosedur formal hukum tanpa melakukan tindakan nyata untuk melenyapkan ketimpangan di bidang ekonomi. Kedua, demokrasi material justru berfokus pada visi mengusahakan hilangnya kesenjangan ekonomi masyarakat, namun model ini cenderung mengabaikan bahkan menghilangkan persamaan dan kebebasan di aspek politik warga negara. Sebagai jalan tengah, demokrasi gabungan hadir untuk menggabungkan nilai-nilai baik serta membuang kecacatan yang ada pada demokrasi formal maupun material, di mana negara berupaya menyelaraskan pengakuan atas kesetaraan hak politik masyarakat dengan perlindungan terhadap kesejahteraan dan keadilan ekonomi bersama.

Sistem politik dunia mengklasifikasikan demokrasi ke dalam dua model utama sebagaimana dijelaskan dalam studi kontemporer oleh Sanjaya (2024). Model pertama adalah demokrasi langsung, sebuah sistem klasik yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga negara tanpa perantara untuk terlibat,

mendiskusikan, dan memutus suatu kebijakan publik atau undang-undang negara secara langsung. Sementara itu, model kedua adalah demokrasi tidak langsung (perwakilan), yang merupakan produk adaptasi dunia modern untuk mengatasi kendala geografis dan lonjakan jumlah populasi, dalam model ini, rakyat tidak lagi membuat kebijakan secara langsung melainkan menyalurkan kedaulatannya dengan cara memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan umum yang jujur untuk duduk di institusi parlemen dan mengambil keputusan politik atas nama rakyat.

model dan bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia pada dasarnya memiliki karakteristik dan manifestasi yang beragam, tergantung pada latar belakang historis, geografis, serta prioritas ideologi yang dianutnya. Menurut analisis integratif yang dikemukakan oleh Pratama (2025), klasifikasi bentuk-bentuk demokrasi ini secara umum dapat ditinjau melalui dua sudut pandang utama, yakni mekanisme penyaluran aspirasi rakyat dan fokus capaian kesejahteraannya.

Jika dirujuk berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, Sanjaya (2024) membaginya menjadi demokrasi langsung—di mana setiap warga negara terlibat aktif tanpa perantara dalam memutus kebijakan publik—dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan yang mengandalkan institusi parlemen sebagai perpanjangan tangan kedaulatan rakyat demi mengatasi keterbatasan geografis serta besarnya jumlah populasi modern.

Sementara itu, dari aspek titik berat perhatiannya, Ramadhan dkk. (2026) memetakan variasi tersebut ke dalam bentuk demokrasi formal yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan hak politik dan hukum, demokrasi material yang

memprioritaskan penghapusan kesenjangan ekonomi meski sering kali mengorbankan kebebasan sipil, serta demokrasi gabungan yang bertindak sebagai jalan tengah dengan menyelaraskan pengakuan hak politik individu sekaligus mengupayakan pemerataan kesejahteraan sosial secara adil dan berimbang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan memberi mereka hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

## **2.2 Nilai-Nilai Demokrasi**

Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2025), nilai merujuk pada standar, bobot, atau kualitas dari sesuatu. Dalam konteks politik, demokrasi menginkubasi seperangkat nilai fundamental yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan berekspresi, toleransi terhadap keberagaman, serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai ini bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi krusial bagi kokohnya tatanan pemerintahan. Tanpa pengimplementasian nilai-nilai tersebut secara konsisten, mekanisme demokrasi akan kehilangan esensinya dan menjadi sulit untuk dioperasikan secara efektif.

Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi :

### **a) Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat**

Hak untuk mengutarakan pemikiran secara bebas merupakan pilar fundamental dalam tatanan demokrasi. Menurut pandangan Dahl (2021), jaminan hukum terhadap hak ini sangat krusial agar setiap lapisan masyarakat memiliki ruang aman untuk menyampaikan aspirasi serta pandangan mereka tanpa tekanan.

Di era demokrasi kontemporer, kebebasan berpendapat telah bertransformasi menjadi parameter utama dalam menilai sejauh mana sebuah negara menghormati hak asasi manusia dan keterbukaan informasi.

b) Hak dalam Menyampaikan Aspirasi

Pada hakikatnya, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengekspresikan pendapatnya yang wajib dijamin oleh negara melalui instrumen hukum yang sah. Pemerintah memegang tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang terdampak negatif oleh kebijakan publik maupun sektor swasta. Sejalan dengan pemikiran Baso dan Hasan (2024), tingkat kematangan demokrasi sebuah negara tercermin dari efektivitas dan kecepatan pemerintah dalam merespons tuntutan serta aspirasi rakyatnya.

c) Kebebasan Berserikat dan Berkelompok

Prinsip dasar demokrasi juga mencakup kebebasan individu untuk membentuk organisasi atau kelompok, seperti serikat buruh, partai politik, organisasi kemahasiswaan, maupun komunitas sosial lainnya. Fenomena berkelompok ini merupakan kecenderungan alami manusia yang telah ada sejak masa primitif untuk bertahan hidup (Baso & Hasan, 2024). Di era kontemporer, urgensi berkelompok semakin tinggi akibat kompleksitas problematika sosial. Dalam pandangan Dahl (2021), organisasi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memecahkan berbagai persoalan kolektif, misalnya dalam koordinasi penyaluran bantuan saat terjadi bencana alam agar lebih sistematis dan cepat.

Selama era Orde Baru, kebebasan dalam berorganisasi mengalami restriksi yang ketat, termasuk adanya batasan legal terhadap pendirian partai politik di luar

ketentuan pemerintah. Sebaliknya, dalam tatanan demokrasi yang inklusif, setiap individu memiliki hak konstitusional untuk mendirikan atau bergabung dengan entitas politik sesuai aspirasi pribadinya. Sistem ini menyediakan ruang bagi kompetisi yang sehat dan beragam pilihan bagi masyarakat (Baso & Hasan, 2024).

d) Hak Partisipasi Publik

Keterlibatan dalam kehidupan demokratis mencakup spektrum yang luas, mulai dari hak suara dalam pemilihan umum hingga interaksi langsung dengan pemegang otoritas publik. Hak partisipasi ini sejatinya merupakan perpaduan antara kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Di negara dengan demokrasi yang tengah bertransformasi seperti Indonesia, kesadaran kolektif masyarakat untuk membentuk kelompok kritis terhadap kebijakan negara semakin meningkat. Menurut Dahl (2021), kritik yang membangun sangat krusial dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan budaya komunikasi dua arah yang transparan antara warga dan pemerintah guna merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.

e) Prinsip Kesetaraan Warga Negara

Egalitarianisme merupakan pilar fundamental dalam demokrasi yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang setara. Prinsip ini menegaskan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, baik yang didasarkan pada aspek etnis, bahasa, asal daerah, maupun keyakinan agama (Baso & Hasan, 2024).

Guna mewujudkan demokrasi yang inklusif, prinsip ekuitas wajib diimplementasikan di seluruh sektor, mulai dari birokrasi pemerintahan hingga

ranah pendidikan dan sosial. Penghapusan segala bentuk diskriminasi menjadi syarat mutlak agar setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara setara. Pengalaman masa Orde Baru, yang diwarnai dengan pembatasan akses hak warga negara, membuktikan bahwa kesetaraan mustahil tumbuh dalam sistem politik yang otoriter dan represif.

f) Kedaulatan di Tangan Rakyat

Esensi dari sistem demokrasi adalah penempatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini berarti publik memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Sebagai pemegang kedaulatan, setiap warga negara berhak memilih pemimpin mereka sekaligus terlibat aktif dalam setiap tahapan proses politik nasional.

Berkaca pada era Orde Baru, banyak aktor politik yang mengabaikan prinsip akuntabilitas publik. Kekuasaan sering kali disalahgunakan demi kepentingan elit atau golongan tertentu, sehingga aspirasi rakyat luas terabaikan. Kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan nilai demokrasi yang mewajibkan setiap pemimpin untuk berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam tatanan demokrasi yang ideal, setiap pejabat publik harus menjunjung tinggi transparansi dan memikul tanggung jawab penuh atas setiap kebijakan yang diputuskan (Hasan, 2024).

Prinsip-prinsip demokrasi sejatinya bukan sekadar aturan formal di atas kertas, melainkan sebuah urat nadi yang menjaga agar kehidupan bernegara tetap berjalan adil, seimbang, dan manusiawi. Menurut rumusan teoretis Henry B. Mayo yang diulas kembali oleh Budiardjo (2023), esensi dari sistem yang demokratis terletak pada kemampuannya untuk menyelesaikan setiap konflik

kepentingan atau perselisihan di tengah masyarakat melalui jalan dialog yang damai dan melembaga, ketimbang menggunakan jalur kekerasan yang destruktif.

Di samping itu, prinsip ini menuntut adanya sirkulasi kekuasaan yang sehat melalui pergantian pimpinan secara teratur, sembari memastikan bahwa penggunaan kekuatan koersif oleh negara ditekan sampai batas paling minimum. Ketika suatu negara mampu merangkul keberagaman pendapat secara wajar, menjamin tegaknya keadilan hukum, serta melindungi hak-hak dasar kelompok minoritas maupun mayoritas, maka pada titik itulah prinsip-prinsip demokrasi berhasil diinternalisasikan sebagai sebuah budaya hidup bersama yang menghargai harkat dan martabat setiap individu.

Nilai-nilai demokrasi pada dasarnya merupakan fondasi utama yang menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan adil, harmonis, dan jauh dari kesewenang-wenangan. Di dalamnya mencakup pengakuan terhadap kebebasan bertindak dan berpendapat yang bertanggung jawab, kesetaraan hak di mata hukum tanpa memandang latar belakang sosial, serta tingginya rasa toleransi dalam menghargai perbedaan. Ketika nilai-nilai ini termasuk keterbukaan informasi dan penyelesaian konflik lewat musyawarah damai diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya akan merasa aman dan dihargai, tetapi juga mampu menciptakan ruang yang sehat bagi setiap orang untuk berkembang bersama.

Demokrasi bukan sekadar sistem politik yang kaku di atas kertas, melainkan sebuah seni hidup bersama yang menuntut kesadaran kita untuk memanusiakan manusia lain. Melalui nilai-nilai seperti kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan hak, dan keterbukaan, kita diajarkan bahwa

kekuatan terbesar sebuah bangsa tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan kita untuk mengelola perbedaan dengan bijak. Ketika setiap keputusan diambil melalui musyawarah yang jujur dan konflik diselesaikan dengan dialog damai, di situlah nilai demokrasi menjelma menjadi pelindung bagi kelompok yang lemah dan jembatan yang menyatukan berbagai latar belakang demi kemajuan bersama.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal utama bagi generasi muda untuk membangun lingkungan yang sehat, adaptif, dan bebas dari perundungan. Ketika kita mulai membiasakan diri untuk mendengarkan pendapat orang lain saat kerja kelompok, menghargai perbedaan latar belakang teman, serta berani menyampaikan kritik secara sopan dan bertanggung jawab, kita sebenarnya sedang menghidupkan esensi sejati dari demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai ini melatih kita menjadi pribadi yang tidak egois, kritis dalam berpikir, dan selalu mengutamakan kolaborasi damai demi menciptakan perubahan positif di sekitar kita.

Di era digital yang serba cepat ini, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan toleransi dituntut untuk ikut berevolusi agar tidak kebablasan. Pentingnya adaptasi nilai demokrasi di dunia maya ini dibahas secara mendalam oleh pengamat politik Yascha Mounk dalam bukunya *The Great Experiment* yang rilis dan ramai didiskusikan pada tahun 2023. Menurutnya, esensi sejati dari demokrasi zaman sekarang adalah bagaimana kita bisa tetap menghargai kesetaraan hak dan perbedaan opini di media sosial tanpa terjebak dalam budaya saling menjatuhkan (*cancel culture*). Menjaga nilai demokrasi hari ini berarti kita harus punya tanggung jawab moral untuk menyaring informasi, tidak asal sebar

hoaks, dan tetap mengedepankan obrolan yang sehat demi menjaga kedamaian bersama.

### **2.3 Mata Pelajaran PKn dalam Pendidikan Demokrasi**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diintegrasikan ke dalam sistem kurikulum nasional di Indonesia sejak tahun 2024. Mata pelajaran ini menyajikan materi yang komprehensif, mulai dari napas sejarah perjuangan bangsa, bentang geografi wilayah, hingga pemahaman mendalam mengenai hak serta tanggung jawab setiap warga negara. Khusus pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), titik berat pembelajarannya diarahkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), muatan kurikulum lebih difokuskan pada pemahaman sejarah bangsa serta sistem tata negara, sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), penekanan utama diberikan pada pendalaman UUD 1945. Dalam konteks pendidikan tenaga pengajar (SPG) pada kurikulum 2024, materi PKn telah diperluas untuk mencakup dinamika kemasyarakatan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara konseptual, istilah kewarganegaraan merujuk pada kedudukan hukum seseorang dalam sebuah negara, sementara pendidikan kewarganegaraan lebih menitik beratkan pada proses sosialisasi politik untuk membentuk sosok warga negara yang ideal (*good citizen*). PKn memiliki misi strategis untuk menanamkan prinsip demokrasi dan HAM, sekaligus menginisiasi terbentuknya masyarakat madani melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan interaktif.

PKn memegang peranan dalam menyemai karakter demokratis pada diri peserta didik dengan menginternalisasi nilai-nilai kebebasan yang bertanggung jawab serta penghormatan terhadap hak sesama. Selain dibekali pemahaman

mengenai hak dan kewajiban, siswa didorong untuk terlibat aktif dalam praktik demokrasi, seperti tradisi musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif. Lebih jauh lagi, pembelajaran ini melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa terhadap berbagai isu sosial serta kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menguasai teori demokrasi di dalam kelas, tetapi juga memiliki kompetensi untuk mengaktualisasikannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat (Baso & Hasan, 2024).

Tantangan terbesar mata pelajaran PKn dalam menghidupkan demokrasi di era sekarang adalah bagaimana mengubah cara belajar yang dulunya kaku dan penuh hafalan teoritis menjadi ruang diskusi yang hidup, relevan, dan adaptif dengan dunia digital anak muda. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, PKn tidak bisa lagi sekadar mengajarkan pasal-pasal di atas kertas, melainkan harus mampu melatih siswa untuk berpikir kritis agar tidak mudah termakan hoaks, tidak terjebak dalam budaya saling menjatuhkan (*cancel culture*), dan bisa menyaring informasi dengan bijak. Guru PKn dituntut untuk kreatif dalam menciptakan “laboratorium demokrasi” di dalam kelas misalnya lewat simulasi debat publik yang sehat, penyelesaian konflik kelompok, hingga bedah kasus-kasus viral dari sudut pandang hukum sehingga siswa tidak hanya paham teorinya saja, tetapi benar-benar bisa merasakan dan mempraktikkan langsung bagaimana cara menjadi warga negara yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab di kehidupan nyata.

#### **2.4 Karakter Demokratis Siswa**

Karakter demokratis dalam kelas antara lain bisa terlihat pada saat kegiatan diskusi kelompok atau musyawarah kelas berlangsung. Pada saat diskusi

kelompok atau musyawarah kelas siswa akan melakukan interaksi dengan orang lain, dari situ akan Terlihat bagaimana seorang siswa mampu berinteraksi dengan baik, serta dapat terlihat kemampuan siswa dalam menghargai orang lain, sikap toleransi mereka terhadap orang lain, serta cara para siswa untuk melakukan musyawarah mufakat.

Salah satu dari 18 nilai karakter yang telah disebutkan tersebut yaitu karakter demokratis. Pentingnya karakter demokratis ditanamkan sejak dini yaitu mengingat situasi dan kondisi di Indonesia saat ini terjadi berbagai kejadian, seperti tawuran pelajar yang mengindikasikan kurang tertanamnya nilai demokratis seperti menghargai orang lain, menilai hak dan kewajiban setiap orang sama, musyawarah mufakat, dan taat kepada peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

. Karakter demokratis sendiri mempunyai arti cara berfikir, bertindak yang sama hak dan kewajiban dengan orang lain. Nilai demokratis dipercaya membawa kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat egalitarian dibandingkan dengan ideologi dan demokrasi. Sikap demokratis ini membawa peserta didik untuk lebih memperhatikan hak dan kewajibannya. Menghargai dan menghormati orang lain.

Karakter demokratis penting dimiliki oleh seseorang, karena karakter terus dapat mengembangkan sikap saling memahami, menghormati, toleransi terhadap sesama terutama terkait dengan hak dan kewajiban. Tanpa karakter demokratis ini, akan muncul pola kehidupan yang saling memaksa, tidak saling akan menghormati hak dan kewajiban setiap orang, dan mementingkan kepentingan diri sendiri (Baharun dan Mahmudah, 2021: 16).

PKn berperan dalam membentuk karakter demokratis siswa dengan menanamkan nilai kebebasan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Selain memahami hak dan kewajibannya, siswa juga diajarkan partisipasi aktif dalam demokrasi, seperti pengambilan keputusan melalui musyawarah. Selain itu, PKn melatih siswa berpikir kritis dan analitis terhadap isu sosial serta kebijakan publik. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai demokrasi harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Mulai dari sistem pengajaran di kelas hingga aktivitas ekstrakurikuler, interaksi antara siswa dan guru harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap Hak asasi manusia, keadilan, dan partisipasi aktif dalam lingkungan sosial.

Salah satu karakter penting yang perlu dikembangkan dalam diri siswa adalah sikap demokratis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi merupakan prinsip hidup yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Konsep ini selaras dengan sila keempat Pancasila, yang menurut Paduan Suara Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (PSM UGM) & Yayasan Tifa (dalam Winarno, 2021) menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas berbasis nilai kekeluargaan, mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa.

Nilai-nilai ini diajarkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang membekali siswa dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Selain melalui pembelajaran di kelas, lingkungan sekolah juga berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Suasana sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung akan mendorong siswa untuk mengembangkan sikap positif. Sekolah yang menerapkan aturan secara adil dan transparan membantu siswa memahami pentingnya disiplin serta tanggung jawab atas tindakan mereka. Pembentukan karakter juga dapat diperkuat melalui pengalaman langsung, memungkinkan siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan karakter yang kuat, siswa tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga memiliki integritas, menghormati perbedaan, serta berkontribusi secara positif bagi lingkungan sekitarnya.

Karakter demokratis bukan berarti kamu harus jago pidato kayak politikus. Karakter ini adalah tentang bagaimana kamu bersikap, berpikir, dan bertindak dengan cara yang menghargai hak dirimu sendiri dan hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Tantangan menjadi siswa di era sekarang jauh lebih kompleks dibanding generasi dulu. Di era media sosial, karakter demokratis siswa diuji secara nyata agar tidak terjebak dalam budaya digital yang toksik. Tantangan nyata ini diulas dalam studi psikologi pendidikan oleh Robert Brooks pada tahun 2024, yang menekankan bahwa pembentukan pola pikir demokratis (seperti empati dan kontrol diri) pada remaja adalah benteng utama untuk menangkal maraknya perundungan siber (cyberbullying) dan polarisasi di dunia maya.

Ketika seorang siswa memiliki karakter demokratis, dia tidak akan mudah terprovokasi oleh hoaks, tidak akan ikut-ikutan melakukan cancel culture

atau menghujat orang lain yang berbeda opini di kolom komentar, dan tahu cara menggunakan jempolnya secara bertanggung jawab.

Karakter ini nggak bisa instan langsung jadi, melainkan harus dipraktikkan lewat hal-hal kecil di sekolah:

1. Aktif di Organisasi: Ikut OSIS, Pramuka, atau ekstrakurikuler adalah cara paling ampuh buat melatih kepemimpinan, mendengar opini orang lain, dan belajar manajemen konflik.
2. Membudayakan Debat Sehat di Kelas: Mengubah suasana kelas menjadi ruang aman di mana semua siswa bebas berpendapat tanpa takut ditertawakan kalau jawabannya salah.
3. Menerapkan Peer-Mediator (Mediasi Teman Sebaya): Menyelesaikan konflik antar-teman lewat obrolan damai yang ditengahi oleh sesama siswa, bukan langsung lewat hukuman guru.

Bentuk-bentuk karakter demokratis tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menghargai persamaan hak serta kewajiban diri sendiri dan orang lain.

## **2.5 Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan**

Membahas tentang sejarah perjalanan PKn dalam kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia ini adalah sangat menarik. Hal ini tentunya begitu dinamis, seiring dengan terjadinya perubahan yang berdasarkan pada perkembangan kurikulum Indonesia (Santika, Suastra, et al., 2022). Namun karena sering kali berganti-gantinya kurikulum di Indonesia tentunya menimbulkan berbagai ungkapan dan tanggapan dari berbagai pihak (Wahyuni et al., 2022).

Bahkan muncul ungkapan yang sangat menggelitik, yang sering kali muncul seiring dengan perubahan penguasa negeri ini yakni „ganti menteri ganti kurikulum (Santika, 2021). Pernyataan itu bukanlah isapan jempol belaka. Karena nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, berulang kali kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan. Sejarah mencatat perubahan kurikulum pendidikan nasional terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 dan 2013. Kemudian muncul perubahan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum merdeka dengan platform merdeka belajar.

Munculnya perubahan terhadap kurikulum pendidikan nasional tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan keberadaannya, bahwa sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat (Santika, Suarni, et al., 2022).

Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila (Satria et al., 2022).

Tentu saja, poin pertama terkait dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, utamanya terkait dengan PPKn, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai esensi, berupa “keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai

macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler”(Kemenristekdikti, 2022).

Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks lokal. “Setiap murid akan melihat semua mata pelajaran dan semua materi dalam konteks”. Kemudian terkait dengan Profil Pelajar Pancasila, Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai Profil Pelajar Pancasila (Setiyaningsih & Wiryanto, 2022).

Adapun enam profil tersebut adalah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya (Marisa, 2021).

## **2.6 Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan**

Evaluasi merupakan salah satu komponen pembelajaran yang memegang peranan penting (Hasbullah, 2021). Tanpa evaluasi kita tidak tahu ketercapaian pembelajaran siswa. Sehubungan dengan itu para guru perlu menguasai konsep dan sistem evaluasi pembelajaran termasuk evaluasi proses dan hasil dalam pembelajaran PKn. Tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ialah untuk menilai kemampuan siswa di bidang berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. Guru dapat menggunakan evaluasi ini untuk menentukan keberhasilan siswa, area pertumbuhan, dan taktik pembelajaran yang tepat (Asrul

dkk., 2020). Ujian ini juga memberi tahu siswa tentang kekuatan dan keterbatasan mereka dalam pendidikan kewarganegaraan, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membantu para pengajar dan sekolah dalam menentukan keefektifan kurikulum dan teknik pengajaran yang digunakan. Guru dapat menentukan apakah siswa memenuhi tujuan pembelajaran dan apakah metode pengajaran yang digunakan efektif dengan meninjau hasil evaluasi (Wayan, 2022).

Evaluasi yang teratur dan menyeluruh juga memungkinkan para pengajar dan administrasi sekolah untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, di sekolah dasar, evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan pendidikan kewarganegaraan yang baik sangat penting untuk memahami mata pelajaran lain seperti sains, matematika, dan sejarah (Mufarizuddin dkk., 2020).

Proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar dipengaruhi oleh peran guru yang kompeten, maka perbaikan baru dalam pandangan tentang belajar mengajar membawa konsekuensi bagi guru untuk meningkatkan peran dan kompetensi mereka. Guru yang kompeten akan lebih siap untuk menyediakan lingkungan belajar yang efektif dan mengelola kelas mereka sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal. Evaluator ialah salah satu tugas pengajar dalam proses belajar mengajar. Pengajar harus menjadi evaluator yang baik selama proses belajar mengajar. Kegiatan evaluasi pembelajaran dirancang untuk

mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah materi yang disampaikan sudah sesuai atau belum. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran pendidikan dasar/tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditinjau dan dikaji dari pendidikan karakter. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Dasar Berbasis Pendidikan Karakter Pendidikan karakter merupakan pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku peserta didik secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah (Gunawan, 2022).

Di sekolah dasar, nilai-nilai disebut sebagai "alat" untuk memperkuat dan mengembangkan perilaku siswa. Pembelajaran pendidikan dasar berbasis pendidikan karakter dievaluasi dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran di setiap mata pelajaran. Pada setiap mata pelajaran, materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai harus disiapkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari dengan menggunakan contoh-contoh nyata yang beragam. Dengan kata lain, pengembangan karakter harus dimulai dari rumah dan sekolah. Melalui pendidikan karakter, siswa diharapkan dapat berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia. Pengembangan nilai-nilai karakter dapat dimasukkan ke dalam penilaian pembelajaran di setiap topik (Rinjani, 2020). Hal ini dikarenakan pembelajaran norma atau nilai akan lebih mudah jika dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari melalui contoh-contoh yang lebih konkret. Pengembangan moral terkait dengan pendidikan karakter. Siswa akan mengembangkan perpaduan antara kecerdasan akademis, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual melalui pendidikan karakter.

Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, evaluasi pembelajaran memegang peranan penting. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli pendidikan kewarganegaraan mengenai pentingnya evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar (Budimansyah, 2022):

1. Memahami kemajuan siswa: Evaluasi pembelajaran membantu guru dalam memahami kemajuan siswa di bidang berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. Guru dapat menggunakan ujian ini untuk menentukan kekuatan dan kekurangan masing-masing siswa dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan guru untuk mengatur pengajaran pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak-anak.
2. Meningkatkan Pengajaran: Penilaian pembelajaran memberikan informasi kepada guru tentang keberhasilan pendekatan pengajaran mereka. Guru dapat menentukan apakah pendekatan pengajaran mereka efektif atau tidak dengan meninjau data evaluasi. Penilaian yang teratur dan komprehensif membantu guru dalam meningkatkan pengajaran mereka dengan merancang taktik yang lebih baik, memilih bahan ajar yang sesuai, dan mengubah pendekatan instruksional berdasarkan kebutuhan siswa.
3. Memberikan Umpan Balik: Evaluasi pembelajaran memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemampuan mereka dalam pendidikan kewarganegaraan. Umpan balik yang jelas dan terarah membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arah untuk perbaikan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa, membangun

kepercayaan diri, dan mengarah pada perkembangan keterampilan pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik.

4. Menyediakan Dasar untuk Perbaikan Kurikulum: Evaluasi pembelajaran juga memberikan dasar bagi pengembangan dan perbaikan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Dengan menganalisis hasil evaluasi, guru dan administrasi sekolah dapat mengevaluasi keberhasilan kurikulum yang ada dan membuat perubahan yang diperlukan. Evaluasi yang terusmenerus membantu dalam memperbaiki bahan ajar, mengidentifikasi kebutuhan siswa, dan mengadaptasi kurikulum agar relevan dengan tuntutan zaman.
5. Memantau Kemajuan Individu dan Kelas: Evaluasi pembelajaran memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa secara individu maupun sebagai kelompok kelas. Dengan pemantauan yang teratur, guru dapat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan dan menyusun program intervensi yang tepat. Ini membantu mencegah kesenjangan belajar dan memastikan bahwa semua siswa mencapai tingkat kemampuan pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, evaluasi pembelajaran sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Evaluasi membantu guru dalam memahami pencapaian siswa, meningkatkan pengajaran, memberikan umpan balik kepada siswa, membangun landasan untuk reformasi kurikulum, dan melacak perkembangan individu (Saiffurrohman, 2021). Namun, berdasarkan pandangan yang luas tentang pentingnya evaluasi pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, temuan penelitian berikut ini sering dikaitkan dengan pentingnya evaluasi

pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar:

1. Identifikasi kebutuhan individu: Evaluasi pembelajaran membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam aspek berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa, guru dapat merancang dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang sesuai, seperti penyediaan bahan ajar yang relevan atau penggunaan metode pengajaran yang berbeda.
2. Pemantauan kemajuan siswa: Evaluasi pembelajaran memungkinkan guru memantau kemajuan siswa seiring waktu. Hal ini membantu dalam melacak perkembangan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan dukungan tambahan untuk membantu siswa mencapai kemajuan yang diharapkan.
3. Peningkatan pengajaran: Evaluasi pembelajaran memungkinkan guru mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang mereka gunakan. Dengan melihat hasil evaluasi, guru dapat menilai apakah metode pengajaran yang diterapkan telah berhasil atau perlu disesuaikan. Evaluasi yang teratur dan komprehensif membantu guru meningkatkan kualitas pengajaran dan memperbaiki bahan ajar.
4. Motivasi dan pemberian umpan balik: Evaluasi pembelajaran memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemampuan pendidikan kewarganegaraan mereka. Umpan balik yang jelas dan terarah membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan keterampilan berpendidikan

kewarganegaraan dan mengembangkan kepercayaan diri.

5. Pengambilan keputusan pendidikan: Evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar juga mendukung pengambilan keputusan yang efektif oleh guru dan administrasi sekolah. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan. Evaluasi yang teratur dan komprehensif membantu sekolah dalam meningkatkan program pendidikan dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

## **2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan**

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan:

Faktor Internal (Subjek Pembelajaran):

1. Guru: Kualitas, kompetensi, inovasi dalam metode pembelajaran (tidak sekadar ceramah), dan kemampuan menggunakan teknologi.
2. Siswa: Tingkat motivasi, minat, sikap, dan kebiasaan belajar dalam mengikuti pendidikan.

Faktor Kurikulum dan Materi:

1. Relevansi Kurikulum: Kesesuaian materi kurikulum dengan kebutuhan zaman dan nilai-nilai demokrasi.
2. Isi Mata Pelajaran: Materi yang kontekstual dan bermakna bagi peserta didik.

Faktor Sarana dan Prasarana:

Ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti teknologi bahan ajar, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak.

Faktor Lingkungan dan Kebijakan:

1. Kondisi Sosial-Budaya: Pengaruh budaya dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.
2. Dukungan Orang Tua/Masyarakat: Dukungan lingkungan rumah dan sosial terhadap pendidikan karakter.
3. Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan pemerintah, anggaran pendidikan, dan kurikulum yang ditetapkan.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Setelah peneliti mengkaji dan memahami penelitian ini baik Proposal maupun pustaka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang bisa menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Suryono, 2021) yang berjudul “Internalisasi nilai kesadaran hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan” metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKN berperan sebagai instrumen preventif dalam mengurangi tingkat pelanggaran norma di sekolah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2020) yang berjudul “Pengaruh literasi politik dan pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi pemilih pemula” Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan menemukan korelasi positif antara pemahaman kewajiban warga negara yang diajarkan di sekolah dengan keinginan siswa untuk terlibat dalam proses

demokrasi yang legal dan transparan

Ketiga, Penelitian oleh (Dewi dan Furnamasari,,2022) yang berjudul “Membangun karakter warga negara yang taat hukum melalui pembelajaran PKn di sekolah dasar”metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.hasil Penelitian menekankan pada pembentukan kebiasaan.

Keempat, Penelitian oleh (Winarno,,2019) yang berjudul “Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan”metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn bukan sekadar transfer ilmu,melainkan pembentukan sikap agar warga negara tidak hanya tahu hukum,tapi juga merasa terikat secara moral untuk mematuhi.

## **2.9 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka disusun kerangka berpikir tentang Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan membentuk pemahaman hukum dan kewajiban warga negara memiliki kerangka berfikir:

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang demokratis, yang ditunjukkan melalui sikap toleransi, tanggung jawab, keadilan, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan bertujuan untuk membekali siswa agar menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara

aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam pembelajaran PKn serta pengaruhnya terhadap pembentukan karakter siswa.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini, bagan skema kerangka konseptual akan disajikan untuk menunjukkan proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn serta dampaknya terhadap perkembangan karakter siswa.



**Gambar 2.1****Kerangka Berpikir**